

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2018 ada beberapa program dalam penggunaan dana Otonomi Khusus, Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengentasan kemiskinan telah berupaya memberikan beberapa kebijakan dan program kepada masyarakat untuk kemudahan memperoleh akses kesempatan kerja dan berusaha, kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang telah merunut berdasarkan Peraturan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur pembagian dan penggunaan dana otonomi khusus. Pembagian dana otonomi khusus 80% (delapan puluh persen) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai: 1) Kebijakan Program Berbasis Pemberdayaan Kampung; 2) Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan; 3) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Pendidikan; 4) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan.

- a. Program Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam upaya pengentasan kemiskinan mendukung kebijakan Prospek dan Program Strategis Lintas Kabupaten dan telah merumuskan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (Program DPKK). Untuk memperlancar

pelaksanaan Program DPKK sendiri Pemda Kabupaten Sarmi menetapkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Dana Pemberdayaan Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memberikan dana untuk seluruh Kecamatan. Setiap Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. Kebijakan dan program perekonomian berbasis kerakyatan. Perekonomian Kabupaten diarahkan: 1) Masyarakat adat berhak untuk mengelola dan memanfaatkan SDA yang tersedia di wilayahnya; 2) Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar dan sektor swasta wajib menyediakan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM, yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga pembiayaan mikro. Keberadaan lembaga pembiayaan mikro belum memihak, melindungi masyarakat adat sehingga belum bisa mengembangkan ekonomi masyarakat.
- c. Kebijakan dan program penyelenggaraan Pendidikan bagi komunitas adat terpencil. Pelayanan Pendidikan bagi komunitas adat terpencil melalui sekolah kampung, terdiri dari: 1) Pendidikan formal berupa: (1) Pendidikan SD kecil, (2) Pendidikan SD dan SMP Satu Atap; 2) Pendidikan non formal berupa: (1) Kursus keterampilan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomis dari keayaan alam setempat, (2) Pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya berbasis komunitas kampung, dan (3) Pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung. Penyelenggaraan Pendidikan bagi komunitas adat terpencil

belum dapat direalisasikan karena belum ada fasilitas penyelenggaraan Pendidikan, dan belum ada ketersediaan tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan.

- d. Kebijakan dan program pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dilakukan, 1) Bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi berhak memperoleh pembebasan biaya, 2) pelayanan kesehatan rujukan diberikan subsidi berupa bantuan biaya transport dan obat-obatan, 3) Ibu hamil diberikan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke anak, 4) Menyediakan makanan tambahan pendamping ASI untuk meningkatkan status gizi bayi, balita, dan anak. Masyarakat yang berada di daerah-daerah tertisolasi belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena belum tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan belum ada tenaga kesehatan yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengentasan kemiskinan telah berupaya memberikan beberapa kebijakan dan program kepada masyarakat, akan tetapi di dalam keseluruhan pelaksanaan program terkait: 1) Kebijakan Program Berbasis Pemberdayaan Kampung; 2) Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan; 3) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Pendidikan; 4) Pelaksanaan Program Dalam Bidang Kesehatan, tidak semua program terealisasi dengan baik salah satunya dalam bidang pendidikan, dimana dalam bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Sarmi dalam kaitannya dengan realisasi program Sekolah Satu Atap bagi Komunitas Adat Terpencil hingga saat ini belum dapat terealisasi dan masih berbasis pada sekolah kampung. Namun, secara keseluruhan pemerintah daerah di

dalam pengelolaan dana otonomi khusus untuk menyikapi persoalan kemiskinan di daerahnya sudah cukup konsen hal tersebut terbukti dengan berhasilnya beberapa kebijakan lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan (DPKK), Perekonomian Berbasis Kerakyatan, pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan, dalam peleksanannya dilapangan dalam terkait kebijakan pelayanan kesehatan dan pendidikan belum dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi khusus yakni dalam hal penganggarannya belum sepenuhnya merata sehingga dapat dikatakan untuk darah-daerah pedalaman dalam akses Pendidikan dan kesehatan masih belum tersentuh, maka disarankan:

- a. Memperjelas dan mempertegas penyaluran bantuan permodalan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, agar memihak, melindungi dan memberdayakan masyarakat, maka perlu dibentuk lembaga khusus yang berfungsi menyalurkan bantuan permodalan bagi UMKM, sehingga masyarakat adat dapat mengelola dan memanfaatkan SDA yang tersedia di wilayahnya, dan dapat mengembangkan kegiatan usaha.
- b. Merubah prinsip kemitraan menjadi prinsip perlindungan. Pemerintah Kabupaten Sarmi bersama dengan lembaga pembiayaan serta pelaku usaha skala besar maupun kecil di dalam pelaksanaan program pembiayaan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha berbasis kerakyatan belum menerapkan prinsip-prinsip perlindungan di dalamnya, tetapi menerapkan

prinsip kemitraan yakni saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip kemitraan tidak berpihak, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.

- c. Memperjelas dan mempertegas pembagian dana otonomi khusus agar dapat dikelola secara adil dan merata serta memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang masih terisolir.